

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Merangin

Novia Sartika

Program Studi Keuangan Daerah FEB Universitas Jambi

Abstract

This research is entitled Analysis of Regional Financial Capacity in the Implementation of Regional Autonomy in Merangin Regency, under the guidance of Mr. Drs. Adi Bhakti,S.E.,M.si. This study aims to determine and analyze the development of regional own-source revenue (PAD), regional financial capability seen by the degree of fiscal decentralization, regional financial capacity seen by the ratio of self-sufficiency, as well as regional financial routine capabilities in Merangin district. The results of this study show that the development of regional original income in Merangin Regency during the 2007-2011 period showed fluctuating growth. The DDF for Merangin Regency is still on a very low interval scale because it is between 0-10%. As for the independence ratio, it is said to be very low, namely between 0-25%. And for routine ability it is said to be low because it is on a scale of 0-30%. The low routine capacity ratio is said to be low because Merangin Regency during the 2007-2011 period indicates that the regional government is still very dependent on the central government.

Keywords: *Regional financial capability, regional autonomy*

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Merangin, di bawah bimbingan Bapak Drs. Adi Bhakti,S.E.,M.si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pendapatan Asli daerah (PAD), Kemampuan keuangan daerah dilihat dengan derajat desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan daerah dilihat dengan rasio kemamdirian, serta kemampuan rutin keuangan daerah di kabupaten Merangin. Hasil Penelitian ini menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin Selama periode 2007-2011 menunjukkan pertumbuhan fluktuatif. Untuk DDF Kabupaten Merangin masih dalam skala interval sangat kurang karena berada antara 0-10%. Sedangkan untuk rasio kemamdirian dikatakan rendah sekali yaitu antara 0-25%. Dan untuk kemampuan rutin dikatakan rendah karena dalam skala 0-30%. Rendahnya rasio kemampuan rutin dikatakan rendah kerana Kabupaten Merangin selama periode 2007-2011 mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Kata Kunci : Kemampuan keuangan daerah, otonomi daerah

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendukung peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi daerahnya sendiri dan menggali sumber dana

yang ada dan potensial guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya. Akibatnya mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah berubah yaitu diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keuangan Daerah Kabupaten Merangin dikelola dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yuliati (2001:22), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

PAD di Kabupaten Merangin mengalami perkembangan yang fluktuatif pada tahun 2009 sebesar 58,55%, tahun 2010 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar -44,15%, pada tahun 2011 meningkat lagi sebesar 27,66%, dan pada tahun 2012 menurun sebesar 16,48%. Sedangkan perkembangan APBD Kabupaten Merangin tahun 2009 sebesar 69,48%, tahun 2010 mengalami signifikan sebesar -0,11%, tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 20,27%, sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 11,38%.

Mengingat begitu strategisnya peran PAD dalam meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan, maka diperlukan upaya yang lebih besar guna meningkatkan penerimaan PAD. Meningkatnya PAD dapat mendorong semakin besarnya penyediaan dana bagi pembangunan daerah. Guna menunjang peningkatan PAD diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan tercermin dari kesadaran mereka dalam membayar pajak dan pungutan lainnya secara legal formal diatur dalam Undang-undang dan peraturan daerah (PERDA). Untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat tersebut maka pemerintah Kabupaten Merangin harus meningkatkan pembangunan ekonomi guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Untuk keperluan dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, adapun data yang tersebut adalah :

1. Data PAD Kabupaten Merangin selama periode 2007-2011
2. Data APBD Kabupaten Merangin selama periode 2007-2011
3. Serta data-data pendukung lainnya

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berdasarkan rentan waktu selama periode 2007-2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin, Badan Perencanaan dan

Pemabangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Merangin, dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Merangin.

Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan :

1. Rumus untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Merangin

$$rRBt = \frac{RBt - RBt - 1}{RBt - 1} \times 100\%$$

2. Rumus untuk mengetahui kemampuan rutin dilihat dengan derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Merangin

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

3. Rumus untuk mengetahui kemampuan rutin dilihat dengan rasio kemandirian di Kabupaten Merangin

Rasio Kemandirian = $\frac{PAD}{Dana\ Perimbangan} \times 100$

4. Rumus untuk mengetahui indeks kemampuan rutin di Kabupaten Merangin

a. $IKR = \frac{PAD}{TBD} \times 100\%$

b. $IKR = \frac{PAD}{TBL} \times 100$

c. $IKR = \frac{PAD}{TBTL} \times 100$

HASIL DAN PEMBAHASAN**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Merangin Periode Tahun 2007-2011**

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Merangin menunjukkan kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun. Perkembangan pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin selama Periode 2007-2011

No	PAD	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pajak Daerah (%)	3.515.481	3.554.460	4.163.212	4.540.879	6.205.941
		-	1,14	1071,22	9,07	36,67
2.	Retribusi Daerah (%)	7.545.181	7.476.814	6.879.750	7.827.314	12.164.535
		-	-1,02	-7,98	13,77	55,41
3.	Laba Badan Usaha Milik Daerah (%)	1.478.400	2.220.833	3.454.153	3.546.525	7.319.416
		-	50,21	55,53	2,67	106,38
4.	PAD lain yang sah (%)	10.510.013	14.509.525	18.213.469	10.186.105	9.710.888
		-	38,05	25,52	-44,07	-4,66
	Total PAD (%)	23.049.074	27.761.631	32.710.601	26.078.135	35.400.815
			20,44	17,83	-20,21	35,63

Sumber : BPS Kabupaten Merangin (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Perkembangan PAD Kabupaten Merangin tahun 2007-2011 menunjukkan fluktuatif. Pertumbuhan yang terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar -4,66. Rendahnya perkembangan PAD disebabkan Kabupaten Merangin Masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat.

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Selama Periode Tahun 2007-2011**Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (TPD).

Derajat Desentralisasi Fiskal selama periode 2007-2011

Tahun	PAD	TPD	DDF (%)	Keterangan
2007	23.049.074.984	453.056.401.870	5,08	Sangat Kurang
2008	27.761.631.588	504.140.180.090	5,50	Sangat Kurang
2009	32.710.610.617	530.910.058.874	6,16	Sangat Kurang
2010	26.078.135.516	561.254.898.913	4,64	Sangat Kurang
2011	35.510.106.169	705.021.873.021	5,03	Sangat Kurang
	Rata-rata		5,28	Sangat Kurang

Sumber : BPS Kabupaten Merangin (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Merangin selama periode 2007-2011 meunjukkan peningkatan dan penurunan. Yang mengalami penurunan yaitu di tahun 2010 sebesar 4,64%. Hal ini membuktikan bahwa

kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerah masih sangat kurang.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Selama Periode Tahun 2007-2011

Rasio kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Merangin selama periode 2007-2011

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	RK (%)	Keterangan
2007	23.049.074.984	417.776.672.950	5,51	Rendah Sekali
2008	27.761.631.588	446.513.186.161	6,21	Rendah Sekali
2009	32.710.610.617	455.979.116.889	7,17	Rendah Sekali
2010	26.078.135.516	492.791.630.981	5,29	Rendah Sekali
2011	35.510.106.169	564.981.380.660	6,28	Rendah Sekali
Rata-rata			6,09	Rendah Sekali

Sumber : BPS Kabupaten Merangin (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rasio kemandirian Kabupaten Merangin selama Periode Tahun 2007-2011 menunjukkan peningkatan dan penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2007 dan 2010 mengalami penurunan sebesar 5,51% dan 5,29%. Sehingga rata-rata kemandirian keuangan daerah Kabupaten Merangin selama lima tahun sebesar 6,09%. Kemandirian Kabupaten Merangin selama periode tahun 2007-2011 dikatakan dalam skala interval instruktif atau memiliki rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah sangat kurang. Hal ini membuktikan bahwa peranan pemerintah pusat masih sangat dominan terhadap pemerintah daerah. Rasio kemandirian yang mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Merangin dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Indeks Kemampuan Rutin di Kabupaten Merangin Periode 2007-2011

Indeks Kemampuan Rutin yaitu PAD dengan Belanja Daerah dalam membiayai pembangunan, yang bersifat rutin maupun pembangunan atau langsung dan tidak langsung. Nilai IKR terletak antara 0 – 100 %, semakin tinggi persentase IKR, maka menunjukkan semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluarannya. Untuk melihat berapa besar kemampuan rutin terhadap belanja daerah dapat dilihat pada tabel 5.2.3. dibawah ini:

Indeks Kemampuan Rutin Terhadap Total Belanja Daerah Selama Periode Tahun 2007-2011

Tahun	PAD	Total Belanja Daerah	IKR (%)	Indeks IKR
2007	23.049.074.984	498.951.545.315	4,61	Rendah
2008	27.761.631.588	569.861.907.433	4,87	Rendah
2009	32.710.610.617	600.778.588.061	5,44	Rendah
2010	26.078.135.516	598.785.723.547	4,35	Rendah
2011	35.510.106.169	721.773.553.875	4,91	Rendah
Rata-rata			4,83	Rendah

Sumber : BPS Kabupaten Merangin (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indeks kemampuan rutin terhadap total

belanja daerah mengalami peningkatan dan penurunan hal ini membuktikan bahwa PAD Kabupaten Merangin dalam kemampuannya yang masih rendah untuk membiayai belanja daerah disebabkan PAD Kabupaten Merangin masih sangat kecil selama ini Kabupaten Merangin lebih banyak bergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Kemampuan Rutin Terhadap Belanja Langsung Kabupaten Merangin Periode 2007-2011

Tahun	PAD	Total Belanja Langsung	IKR (%)	Indeks IKR
2007	23.049.074.984	279.028.605.201	8,25	Rendah
2008	27.761.631.588	267.363.903.067	10,38	Rendah
2009	32.710.610.617	292.039.010.534	11,20	Rendah
2010	26.078.135.516	248.201.727.001	10,50	Rendah
2011	35.510.106.169	343.644.595.777	10,33	Rendah
Rata-rata			10,33	Rendah

Sumber: BPS Kabupaten Merangin (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kemampuan rutin terhadap belanja langsung terjadi peningkatan dan penurunan. Indeks Kemampuan Rutin yang terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 8,25%. Hal ini di simpulkan bahwa indeks kemampuan rutin dari sisi belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam membiayai pemabungan daerah dikatakan masih kurang dan dikatakan masih bergantung pada pemerintah pusat.

Kemampuan Rutin Terhadap Belanja Tidak Langsung Kabupaten Merangin Periode 2007-2011

Tahun	PAD	Total Belanja Tidak Langsung	IKR (%)	Indeks IKR
2007	23.049.074.984	219.922.940.114	10,48	Rendah
2008	27.761.631.588	240.233.742.014	11,55	Rendah
2009	32.710.610.617	279.360.902.790	11,70	Rendah
2010	26.078.135.516	322.779.441.013	8,08	Rendah
2011	35.510.106.169	362.338.381.628	9,80	Rendah
Rata-rata			10,32	Rendah

Sumber: BPS Kabupaten Merangin, (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas bahwa terlihat bahwa Kemampuan Rutin Terhadap Belanja Tidak Langsung Kabupaten Merangin periode selama 2007-2011 mengalami peningkatan dan penurunan. Indeks Kemampuan Rutin yang terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 8,08. Peningkatan dan penurunan yang tidak stabil ini disebabkan karena naik turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Dilihat dari rata-rata selama periode 2007-2011 pemerintah Kabupaten Merangin dalam membiayai pembangunan daerah dikatakan masih rendah, hal ini membuktikan bahwa Merangin masih sangat tergantung kepada Pemerintah pusat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil

beberapa kesimpulan mengenai analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Merangin.

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuatif dari tahun ketahun
2. Selama tahun 2007-2011 kemampuan keuangan daerah dilihat dengan derajat desentralisasi fiskal rata-rata sebesar 5,28%.
3. Kemampuan keuangan daerah dilihat dengan rasio kemandirian rata-rata sebesar 6,09%.
4. Indeks kemampuan rutin terhadap total belanja daerah, belanja langsung, belanja tidak langsung rata-rata sebesar 4,83%, 10,33%, 10,32%.

Saran

Berdasarkan hasil Penelitian tersebut, maka dapat di kembangkan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Perkembangan PAD dan APBD yang tidak stabil perlu di tingkatkan.
2. Rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal daerah perlu di tingkatkan setiap tahunnya.
3. Kemandirian keuangan daerah perlu di perbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan setiap tahunnya agar mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.
4. Rendahnya kemampuan keuangan, khususnya pengeluaran rutin pemerintah Kabupaten perlu memprioritaskan peningkatan sumber pendapatan agar lebih mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. (2006). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satyawacana Salatiga.
- Adi, Priyo Hari. (2006). *Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Skripsi.
- Anita, Wahyuni, (2008). *Desentralisasi Fiskal*. Jurnal.
- Bappenas. (2003). *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- DPKAD, (2013). *Kabupaten Merangin Dalam Angka*, Kabupaten Merangin
- Efendi, Wuryanti. (2003). *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Nganjuk*. Skripsi.
- Frediyanto, (2010). *Kemampuan Keuangan Daerah Kota Medan*. Skripsi.
- Halim, Abdul. Kusufi, Muhammad Syam, (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* edisi 4. Salemba Empat Jakarta.
- Handayani, (2006). *Otonomi Daerah terhadap Kemandirian dan Pemerataan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Se-bali*. Skripsi.
- Hasbi Ash Shiddiqy Mohammad, (2012). *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kurrohman, Taufik. (2006). *Analisis Komparasi Perkembangan Keuangan Berbasis Rasio APBD antar Daerah dengan PDRB Tinggi dan Rendah di Era Otonomi*. Skripsi. Universitas Jember.
- Kaho, Berti. (2006). *Kemampuan Keuangan Daerah Kota Medan*. Skripsi.
- Kuncoro, M. (2003). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.

- Mardiasno, (2002). *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/Artikel_3.htm
- Mahsun, Mohammad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyani, Nanik, (2006). *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*. Skripsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rinaldi, Udin, (2009). *Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang*. Skripsi.
- Rosidi, Utang (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Setia. Bandung.
- Rahmadi Selamat, (2009). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah*. UNJA Jambi.
- Sasana, (2006). *Otonomi Daerah*. Skripsi. Tidak dipublikasikan.
- Sugianto, (2000). *Kemampuan Keuangan Daerah dalam Berotonomi*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004. *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang No.17 Tahun 2003. *tentang Keuangan Negara*.
- Yuliati. (2001). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah*. Yogyakarta. UPP-YKPN.
- _____, No.33 Tahun 2004. *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.